

PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, secara rinci hasil *evaluasi capaian kinerja fisik* terhadap 16 (enam belas) program baik.

Dari hasil *evaluasi capaian kinerja keuangan* terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) program yang berkinerja sangat baik dan 4 (empat) program yang berkinerja baik.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 terdapat 16 (enam belas) program terdiri dari 11 (sebelas) program strategis dan 5 program pendukung. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi/keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 terdapat 16 (enam belas) program terdiri dari 11 (sebelas) program strategis dan 5 program pendukung. *Output* dan *outcome* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi / keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LKPJ ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2019 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Januari 2020

Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640515 199003 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi.....	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi	8
1.5. Isu Strategis	9
1.6. Dasar Hukum	10
BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	12
2.1 Capaian Pelaksanaan Program	12
2.2 Outcome Program	32
2.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah	37
2.3.1 Persentase Jalan Mantap	38
2.3.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan	45
2.3.3 Cakupan Air Minum	45
2.3.4 Cakupan Sanitasi	49
2.3.5 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	51
2.4 Permasalahan dan Solusi	52
2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018....	61
BAB III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	66
3.1 Dasar Hukum	66
3.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	66
3.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan	67
3.4 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya	67
3.5 Sumber dan jumlah anggaran.....	70
3.6 Permasalahan dan Solusi.....	70
BAB IV. PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PU dan Penataan Ruang dibentuk pada berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PU dan Penataan Ruang sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan program kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ada pada APBD-P tahun 2019 sebanyak 16 program dan 167 kegiatan.

Dalam penyusunan Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksaan kesekretariatan dinas
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

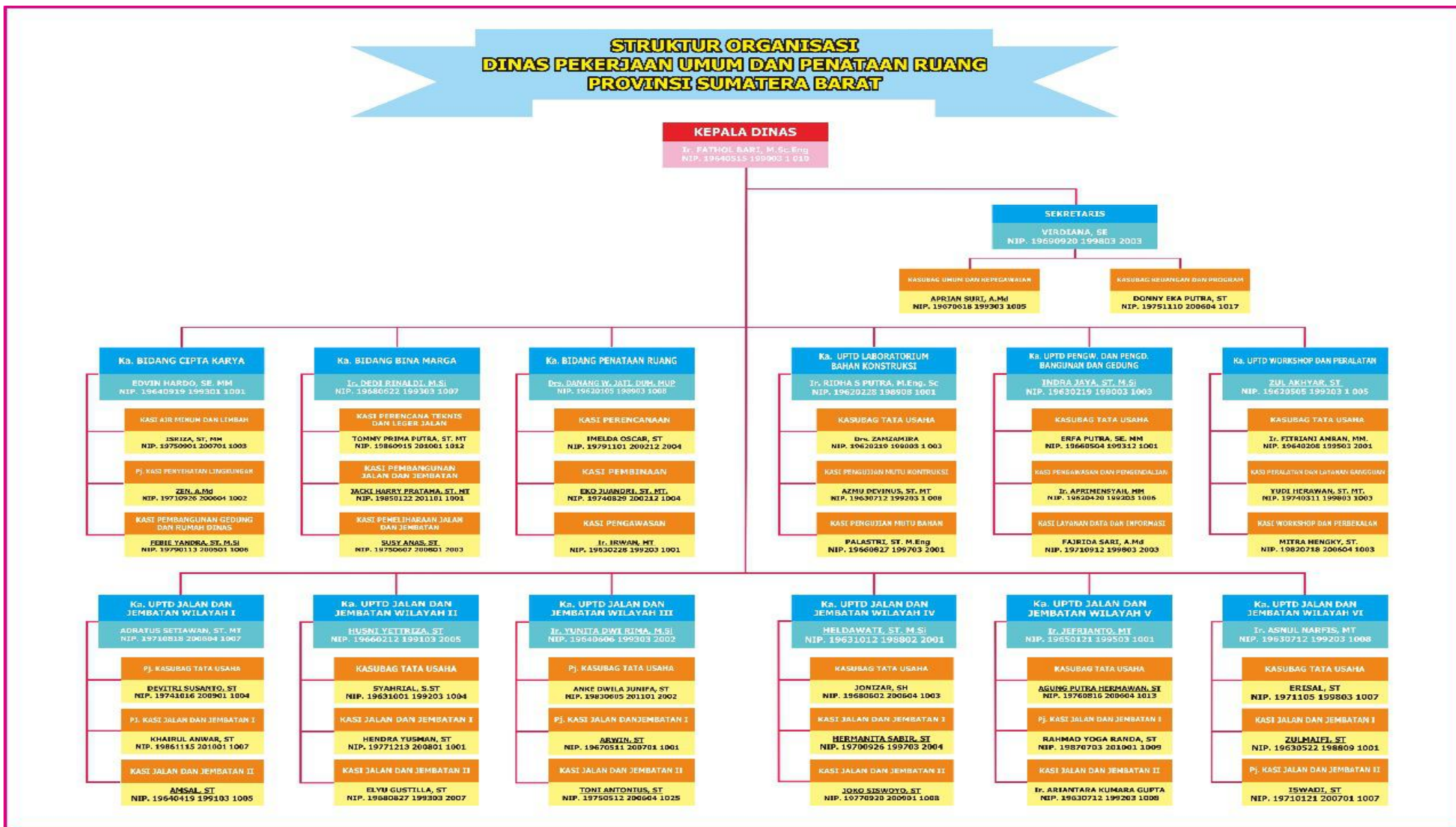
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari 4 (empat) bidang dan 9 (sembilan) UPTD sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Marga
 - 3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan
 - 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
 - 4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - 4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara
 - 4.3. Seksi Air Minum dan Limbah
5. Bidang Penataan Ruang
 - 5.1. Seksi Perencanaan
 - 5.2. Seksi Pembinaan
 - 5.3. Seksi Pengawasan
6. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
 - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 6.2. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
 - 6.3. Seksi Pengujian Mutu Bahan
7. UPTD P2BG
 - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 7.3. Seksi Layanan Data dan Informasi
8. UPTD Workshop dan Peralatan
 - 8.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 8.2. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
 - 8.3. Seksi Workshop dan Perbekalan

9. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
 - 9.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 9.2. Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 9.3. Seksi Jalan dan Jembatan II
10. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II
 - 10.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 10.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 10.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
11. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III
 - 11.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 11.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 11.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
12. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV
 - 12.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 12.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 12.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
13. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V
 - 13.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 13.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 13.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
14. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI
 - 14.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 14.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 14.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
15. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat dilihat pada **gambar 1.1**.

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

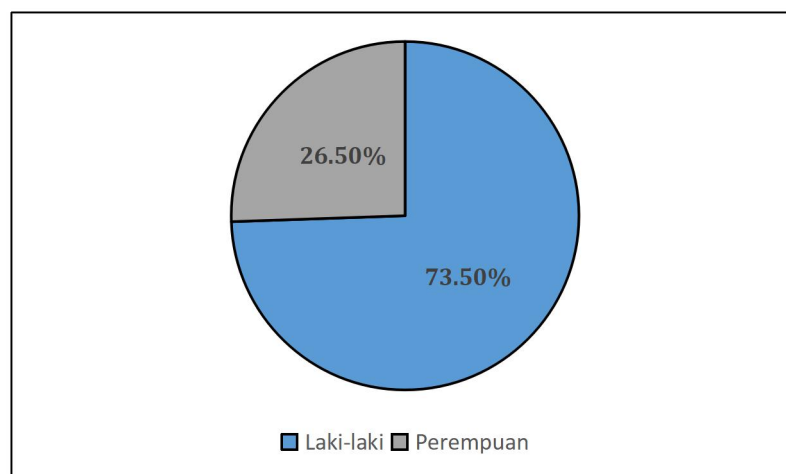


1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah 351 (Tiga ratus lima puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada **tabel 1.2**.

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	258 orang	73.50%
Perempuan	93 orang	26.50%



Gambar 1. 2
Jumlah Pegawai Dinas PUPR Tahun 2019

Pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikannya ditampilkan pada **tabel 1.3**.

Tabel 1. 3
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	4	-	4
SLTP Sederajat	13	-	13
SLTA Sederajat	106	21	127
DIII	17	8	25
DIV	-	-	-
S1	89	57	146
S2	29	7	36
Jumlah	258	93	351

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	-	-	-
1b	1	-	1
1c	2	-	2
1d	5	-	5
2a	8	1	9
2b	10	-	10
2c	38	1	39
2d	54	13	67
3a	45	16	61
3b	35	16	51
3c	22	27	49
3d	23	11	34
4a	7	9	16
4b	5	-	5

4c	1	-	1
4d	1	-	1
4e	-	-	-

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemnatapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan lainnya dalam rangka rekonstruksi bangunan yang ada di Sumatera Barat. Pembangunan bangunan strategis yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu Main Stadium Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan, Gedung Bundo Kandung, Gedung Samsat dan Convention Hall.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP Mandeh) dan RTR KSP Pasopala. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan penyusunan database ke PUan dan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPUR dapat mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. Isu Strategis

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal. Adapun upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu antara lain : (1) masih ada jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir, (2) kemandirian jalan provinsi sebesar 73,015 % dengan deviasi yang cukup jauh dari kemandirian jalan nasional (92,83 %) sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan agar mencapai setidaknya 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak masih mengalami berbagai kendala, yaitu masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur; terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Dalam bidang Penataan Ruang, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan

terutama pemanfaatan ruang; rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang; terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

1.6. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 53/2019 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program

Untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dialokasikan anggaran pada APBD awal Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 505.100.872.928,00 dan pada APBD-P Provinsi Sumatera Barat berkurang menjadi Rp. 479.186.523.089,00. Anggaran tersebut tersebar di 16 program dan 167 kegiatan dengan capaian realisasi pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 395.100.652.064,66 (82,45%) dengan sisa anggaran Rp. 84.085.871.024,34. Adapun program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. ***Program pelayanan administrasi perkantoran (1.01.1.01.03.01.001)***, didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran Rp. 5.495.289.048,- dan realisasi sebesar Rp. 5.444.171.352,- (99,07%). Program ini berisikan kegiatan rutin yang setiap tahunnya ada dengan output sebagai berikut :
 - Tersedianya bahan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran administrasi surat menyurat pada Dinas selama 1 tahun.
 - Terlaksananya kebutuhan layanan jasa komunikasi, air, sumber daya listrik selama 12 bulan.
 - Terpenuhinya jasa kebersihan lingkungan, keamanan kantor serta tersedianya tenaga supir kantor.
 - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan
 - Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
 - Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
 - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan selama 12 bulan
 - Terpenuhinya kebutuhan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan.

- Terlaksananya kegiatan informasi, dokumentasi & publikasi selama 12 bulan.

2. ***Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.01.1.01.03.01.002)***, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran Rp. 6.619.374.100,- dan realisasi sebesar Rp. 6.507.910.789,- (98,32 %) dengan output sebagai berikut :

- Tersedianya computer dan jaringan komputerisasi (PC, printer, notebook)
- Terpeliharanya secara rutin gedung kantor meliputi ; pemeliharaan plumbing & sanitasi, cover balok, base isolator, gedung kantor pariaman, kawasan kantor dinas PUPR dan tersedianya dokumen perencanaan rehab gedung kantor UPTD Wilayah VI pariaman,UPTD sijunjung & UPTD Pasaman
- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 2 kendaraan roda 2, 30 roda 4, 1 Kendaraan roda 6
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor meliputi Papan Informasi 6 bh, Plakat 12 bh, Rambu 2 bh, Meja Eselon 5 bh, Kursi Eselon 20 bh, Lemari Arsip Sofa bed 1 bh, Mesin Penghancur Kertas 3 bh, Mesin Absensi 3 bh, AC 2 Unit, Meja Security 4 bh, kursi Security 9 bh, TV 4 unit, Kulkas 1 Unit
- Terpeliharanya perlengkapan kantor meliputi 2 Fax, 4 unit Genset, 1 paket Pompa Air,1 Retribusi Pemadam Kebakaran , 20 Tabung Pemadam, 25 unit PC, 25 unit Notebook, 25 unit Printer.

3. ***Program peningkatan disiplin aparatur (1.01.1.01.03.01.003)***, didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 275.352.800,- dan realisasi sebesar Rp. 271.272.000,- (98.52 %) . Output program ini adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian karyawan dinas PUPR tahun 2019.

4. ***Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur***

(1.01.1.01.03.01.004), didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 264.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 254.909.897,- (96.27 %). Output program ini adalah terpenuhinya kebutuhan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi PNS yang ada di Dinas PUPR tahun 2019.

5. **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.01.1.01.03.01.005)**, didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.661.967.928,- dan realisasi sebesar Rp. 1.503.281.379,- (90,45 %), dengan output sebagai berikut :

- Tersusunya RKA dan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Tercapainya Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan selama 12 bulan.
- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD meliputi LAKIP, LKPJ dan LPPD.
- Terlaksananya monitoring dan pelaporan kegiatan Dinas PUPR.

6. **Program pembangunan jalan dan jembatan (1.01.03.1.01.03.01.032)**, didukung oleh 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 184.577.512.989,-, dan realisasi sebesar Rp. 154.051.894.972,06 (83,46 %) dengan output sebagai berikut :

- Terlaksananya pembangunan jalan sepanjang 10,99 km.
- Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 10,72 km.
- Terlaksananya pembangunan jembatan sepanjang 160 m.
- Tersedianya dokumen database survey jalan&jembatan sebanyak 3 (tiga) buah.
- Tersedianya dokumen perencanaan jembatan sebanyak 4 (empat) buah.
- Tersedianya dokumen perencanaan jalan sebanyak 11 (sebelas) buah.
- Tersedianya dokumen lingkungan hidup sebanyak 8 (delapan) buah.
- Tersedianya dokumen pengawasan jalan & jembatan sebanyak 29 (dua

puluh sembilan) buah.

- Terlaksananya penyiapan lahan untuk infrastruktur 108.250 m.

7. **Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan (1.01.03.1.01.03.01.033)**, didukung oleh 58 (lima puluh delapan) kegiatan dengan anggaran Rp. 48.377.347.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.955.031.970,60 (99,13 %) dengan output sebagai berikut :

- Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan di 53 ruas jalan yang ada di 19 kab/kota.
- Terlaksananya pengadaan 2 Unit Back Hoe Loader dan 1 Unit Excavator Mini, 1 paket Armco.
- Terpeliharanya peralatan jalan&jembatan sebanyak 64 unit.
- Terpeliharanya jembatan provinsi dan bangunan pelengkap jalan sepanjang 74.8 m.
- Terlaksananya penanganan kritis serta ULG di 10 wilayah.

8. **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (1.01.03.1.01.03.01.034)**, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 3.735.168.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.705.302.724,- (99,20 %) dengan output sebagai berikut :

- Tersedianya peralatan laboratorium meliputi 2 unit *Drilling Machine* ; Alat Laboratorium Geoteknik ; Alat Laboratorium Beton, Aspal, dan agregat ; Alat Pengujian TABG ; alat Pengolah Data Laboratorium dan Alat *Soil Test*
- Terpeliharanya alat-alat ukur yang ada di laboratorium dengan mengganti suku cadang dan kalibrasi.
- Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Mutu UPTD.

9. **Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah (1.01.03.1.01.03.01.035)**, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 913.790.000,- dan realisasi sebesar Rp. 801.506.936,- (87,71 %) dengan output sebagai berikut :

- Tersusunnya 1 (satu) dokumen DED Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh
 - Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh.
 - Terfasilitasinya pendampingan Teknis Program Sanimas IDB dan PPSP.
10. ***Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (1.01.03.1.01.03.01.036)***, didukung oleh 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan anggaran Rp. 214.708.096.624,- dan realisasi sebesar Rp. 163.126.937.373,- (75,98 %) dengan output sebagai berikut :
- Terlaksananya Informasi Teknis Keciptakarya dan Konsultasi Teknis .
 - Tersusunnya DED dan dokumen lingkungan Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat .
 - Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung kebudayaan provinsi Sumbar.
 - Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara yaitu gedung beladiri KONI.
 - Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat.
 - Tersusunnya DED dan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat.
 - Terlaksananya Review Dokumen Perencanaan dan Dokumen Andalalin pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat
 - Terlaksananya Pembinaan TABG ke seluruh kabupaten/kota
 - Terlaksananya pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Mushalla Jabal Rahmah Painan.
 - Terlaksananya pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat.
 - Terlaksananya pembangunan Lapangan Tenis Indoor di Komplek Gubernur.
 - Terlaksananya pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati.

- Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat
 - Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang.
 - Terlaksananya lanjutan pembangunan stadium utama provinsi Sumbar.
 - Terlaksananya pembangunan Guest House Gubernur.
11. ***Program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (1.01.03.1.01.03.01.037)***, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 773.788.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 605.953.577,- (78,31 %) dengan output sebagai berikut :
- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendalaman Perpres No. 16 Tahun 2018, Sosialisasi ISO 17027 tahun 2017, Sosialisasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi UU NO.2 Tahun 2017, Sosialisasi SE Menteri PU No. 66 tahun 2015, Forum Komunikasi dan Sosialisasi Permen PU No 2 tahun 2108.
 - Terlaksananya Bimtek Perpres No16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang, Bimtek Aspek Hukum Kontrak, Bimtek Sistem Manajemen Mutu, Bimtek Sistem Manajemen K3 Konstruksi, Bimtek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
12. ***Program Perencanaan Penataan Ruang (1.01.03.1.01.03.01.038)***, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran Rp. 4.733.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.090.939.998,- (86.43 %) dengan output sebagai berikut :
- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang dan Sosialisasi Perda Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat sebanyak dua kali
 - Tersusunnya ranperda penyempurnaan materi teknis RTR kawasan strategis provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan Pasopala.
 - Tersusunnya laporan pemutakhiran peta dasar, peta tematik, peta rencana RTR KSP Kawasan Metropolitan Pasopala.
 - Tersusunnya draft KLHS Pasopala.

- Terlaksananya Rakor TRKPRD, Rapat Rutin TKPRD dan Rapat Khusus TKPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - Tersusunnya Laporan TKPRD untuk Kemendagri dan Gubernur.
 - Tersusunnya laporan pemutakhiran peta dasar, peta tematik, peta rencana RTR KSP Kawasan Mandeh.
 - Tersusunnya laporan penyempurnaan materi teknis RTR kawasan strategis provinsi (KSP) Mandeh.
 - Tersedianya file shp database kePUan dan Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat dan Rapat Koordinasi Teknis *One Map One Policy*.
 - Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas SDM penataan ruang.
 - Terlaksananya Kampanye Publik Penataan Ruang melalui Media Massa dan Pembuatan bahan komunikasi spasial penataan ruang.
13. ***Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (1.01.03.1.01.03.01.039)***, didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan anggaran Rp. 424.759.000,- dan realisasi sebesar Rp. 410.989.119,- (96,76 %) dengan output terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi UPTD worksop & peralatan dan UPTD laboratorium.
14. ***Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota (1.01.03.1.01.03.01.040)***, didukung oleh 6 (enam) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.638.277.400,- dan realisasi sebesar Rp. 1.478.956.569 (90,28 %) dengan output sebagai berikut :
- Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi kegiatan Pamsimas di kab/kota.
 - Adanya Dokumen FS SPAM Regional Kab. Solok - Kota Solok.
 - Adanya Dokumen FS SPAM Regional Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
 - Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat.
15. ***Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi (1.01.03.1.01.03.01.041)***, didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan

anggaran Rp. 4.805.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.744.636.685,- (98,74 %) dengan outputnya sebagai berikut :

- Tersusunnya DED Drainase Kab. Padang Pariaman.
- Terlaksananya pembangunan drainase Kab. Solok dan Kota Solok.
- Terlaksananya pembangunan drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh.

16. **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1.01.03.1.01.03.01.042)**, didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan anggaran Rp. 182.620.000,- dan realisasi sebesar Rp. 146.956.724,- (80.47 %) dengan output sebagai berikut:

- Tersusunnya Dokumen Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota dan Dokumen Sinkronisasi program pembangunan dengan rencana tata ruang Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya workshop wasmalitrik yang membahas pelanggaran penegakan hukum di bidang tata ruang.

Rekapitulasi capaian pelaksanaan program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ditampilkan pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar Tahun 2019**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG	479,186,523,089.00	395,100,652,064.66	84,085,871,024.34	82.45
1.01.1.01.03.01.001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5,495,289,048.00	5,444,171,352.00	51,117,696.00	99.07
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	7,497,760.00	2,240.00	99.97
002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1,722,649,000.00	1,711,864,324.00	10,784,676.00	99.37
003	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2,071,303,848.00	2,047,960,291.00	23,343,557.00	98.87
008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180,000,000.00	179,973,970.00	26,030.00	99.99
009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	149,555,210.00	444,790.00	99.70
010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	29,934,297.00	65,703.00	99.78
013	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	34,500,000.00	34,494,500.00	5,500.00	99.98
015	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	1,046,986,200.00	1,036,124,741.00	10,861,459.00	98.96
017	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	252,350,000.00	246,766,259.00	5,583,741.00	97.79
1.01.1.01.03.01.002	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6,619,374,100.00	6,507,910,789.00	111,463,311.00	98.32
002	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	392,202,800.00	386,818,100.00	5,384,700.00	98.63
005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,700,000,000.00	1,676,146,798.00	23,853,202.00	98.60
006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	601,200,000.00	598,440,571.00	2,759,429.00	99.54
037	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,148,150,000.00	1,134,490,000.00	13,660,000.00	98.81
361	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Mess	2,033,827,400.00	1,975,148,650.00	58,678,750.00	97.11

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
371	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	675,993,900.00	669,409,170.00	6,584,730.00	99.03
86	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	68,000,000.00	67,457,500.00	542,500.00	99.20
1.01.1.01.03.01.003	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	275,352,800.00	271,272,000.00	4,080,800.00	98.52
001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	275,352,800.00	271,272,000.00	4,080,800.00	98.52
1.01.1.01.03.01.004	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	264,800,000.00	254,909,897.00	9,890,103.00	96.27
001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	264,800,000.00	254,909,897.00	9,890,103.00	96.27
1.01.1.01.03.01.005	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,661,967,928.00	1,503,281,379.00	158,686,549.00	90.45
001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	270,806,000.00	234,089,105.00	36,716,895.00	86.44
002	Penatausahaan Keuangan SKPD	999,260,000.00	925,317,742.00	73,942,258.00	92.60
003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	184,714,000.00	166,180,062.00	18,533,938.00	89.97
005	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	207,187,928.00	177,694,470.00	29,493,458.00	85.76
1.01.03.1.01.03.01.032	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	184,577,512,989.00	154,051,894,972.06	30,525,618,016.94	83.46
006	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei.Lolo - Gelugur (P.101)	6,052,944,100.00	5,493,935,790.00	559,008,310.00	90.76
007	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	1,476,078,000.00	1,473,436,400.00	2,641,600.00	99.82
010	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Simp. Patai) (P.081)	3,182,085,200.00	3,181,122,933.00	962,267.00	99.97
011	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat	3,294,320,000.00	3,239,248,400.00	55,071,600.00	98.33

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
	(P.104)				
013	Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	19,858,130,489.00	10,122,707,298.06	9,735,423,190.94	50.98
014	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)	5,843,480,900.00	5,840,652,251.00	2,828,649.00	99.95
015	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)	3,206,813,800.00	3,195,376,565.00	11,437,235.00	99.64
016	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	3,304,971,800.00	3,146,029,600.00	158,942,200.00	95.19
019	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	67,100,000.00	47,062,278.00	20,037,722.00	70.14
021	Pembangunan Jembatan Kuranji Kota Padang	16,119,397,500.00	16,096,201,100.00	23,196,400.00	99.86
025	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang (P.080)	2,813,726,600.00	2,811,680,350.00	2,046,250.00	99.93
031	Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi	1,732,064,300.00	1,731,407,171.00	657,129.00	99.96
039	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)	2,724,506,100.00	2,721,977,271.00	2,528,829.00	99.91
040	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj.Ampalu (P. 007)	4,194,115,000.00	4,194,007,200.00	107,800.00	100.00
041	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)	2,569,784,200.00	2,567,011,842.00	2,772,358.00	99.89
042	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	767,875,000.00	760,362,513.00	7,512,487.00	99.02
043	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	3,236,976,000.00	3,234,884,137.00	2,091,863.00	99.94
044	Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)	16,124,400,000.00	6,607,886,950.00	9,516,513,050.00	40.98
046	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	2,599,915,600.00	2,582,079,769.00	17,835,831.00	99.31
049	Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	4,271,605,300.00	4,268,121,483.00	3,483,817.00	99.92
052	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu	486,194,700.00	484,031,300.00	2,163,400.00	99.56

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)				
055	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	600,204,000.00	528,181,071.00	72,022,929.00	88.00
056	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)	3,507,765,800.00	3,507,360,650.00	405,150.00	99.99
059	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)	1,000,000,000.00	990,089,400.00	9,910,600.00	99.01
060	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei.Dareh (P.056.3)	3,243,899,000.00	3,226,378,350.00	17,520,650.00	99.46
063	Updating Database Jalan Provinsi	603,843,500.00	597,505,089.00	6,338,411.00	98.95
064	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	2,717,927,500.00	2,703,775,569.00	14,151,931.00	99.48
066	Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	50,486,625,000.00	40,645,170,462.00	9,841,454,538.00	80.51
067	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	884,912,200.00	873,593,800.00	11,318,400.00	98.72
069	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	3,326,330,700.00	3,326,210,500.00	120,200.00	100.00
070	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	6,292,471,900.00	6,275,246,006.00	17,225,894.00	99.73
072	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	2,155,916,000.00	1,813,663,901.00	342,252,099.00	84.12
074	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)	2,744,185,000.00	2,683,409,155.00	60,775,845.00	97.79
076	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah II	2,927,247,800.00	2,927,247,800.00	0.00	100.00
077	Survey Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam	159,700,000.00	154,840,618.00	4,859,382.00	96.96
1.01.03.1.01.03.01.0	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN	48,377,347,200.00	47,955,031,970.60	422,315,229.40	99.13

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
33	JEMBATAN				
001	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi	122,120,000.00	121,938,865.00	181,135.00	99.85
003	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Sp.Patai)	303,900,000.00	302,215,225.00	1,684,775.00	99.45
004	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto	761,400,000.00	760,746,214.00	653,786.00	99.91
006	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Tj. Simalidu	414,260,000.00	413,434,390.00	825,610.00	99.80
007	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	3,465,000,000.00	3,264,180,799.60	200,819,200.40	94.20
008	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang - Bts. Sumut	58,580,000.00	58,245,130.00	334,870.00	99.43
009	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai	3,126,650,000.00	3,100,436,062.00	26,213,938.00	99.16
011	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simuncung - Tj. Ampalu	273,760,000.00	272,673,593.00	1,086,407.00	99.60
012	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	27,840,000.00	27,478,350.00	361,650.00	98.70
013	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	896,080,000.00	895,645,359.00	434,641.00	99.95
014	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan (Payakumbuh)	551,290,000.00	549,913,431.00	1,376,569.00	99.75
015	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Aro - Lubuk Malako	466,400,000.00	465,928,902.00	471,098.00	99.90
017	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	571,760,000.00	571,233,600.00	526,400.00	99.91
018	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin	429,150,000.00	426,517,603.00	2,632,397.00	99.39

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
020	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Junction	2,841,760,000.00	2,838,933,016.00	2,826,984.00	99.90
022	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar	1,802,150,000.00	1,801,466,950.00	683,050.00	99.96
023	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau	693,900,000.00	684,648,125.00	9,251,875.00	98.67
025	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts.Sitangkai - Tj. Ampalu	428,760,000.00	428,447,756.00	312,244.00	99.93
027	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan	907,700,000.00	907,449,692.00	250,308.00	99.97
028	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Batusangkar	458,900,000.00	452,957,537.00	5,942,463.00	98.71
029	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir	396,400,000.00	395,969,140.00	430,860.00	99.89
030	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembayan	744,600,000.00	742,419,100.00	2,180,900.00	99.71
031	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripa - Tj.Balit - Pdg Ganting	716,400,000.00	715,366,490.00	1,033,510.00	99.86
033	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Abai Siat	811,760,000.00	811,721,121.00	38,879.00	100.00
035	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka	981,400,000.00	978,918,025.00	2,481,975.00	99.75
036	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji	569,900,000.00	563,649,050.00	6,250,950.00	98.90
038	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tn. Badantung	306,760,000.00	306,224,509.00	535,491.00	99.83
039	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Inderapura -	182,500,000.00	182,003,950.00	496,050.00	99.73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Muara Sakai				
040	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat	2,246,030,000.00	2,244,501,847.00	1,528,153.00	99.93
041	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Batusangkar	686,150,000.00	684,544,615.00	1,605,385.00	99.77
042	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang	1,353,900,000.00	1,352,597,540.00	1,302,460.00	99.90
043	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Napar - Bukit Bual - Tj.Ampalu	329,260,000.00	328,782,391.00	477,609.00	99.85
044	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	2,087,170,000.00	2,086,305,603.00	864,397.00	99.96
045	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo	73,560,000.00	73,457,980.00	102,020.00	99.86
046	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	1,174,400,000.00	1,125,773,223.00	48,626,777.00	95.86
047	Pengendalian Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan Provinsi	180,244,000.00	176,220,688.00	4,023,312.00	97.77
048	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang	349,900,000.00	347,363,454.00	2,536,546.00	99.28
049	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman	685,340,000.00	683,453,100.00	1,886,900.00	99.72
051	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj.Ampalu - Sijunjung	466,760,000.00	466,187,434.00	572,566.00	99.88
052	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat	218,800,000.00	217,162,237.00	1,637,763.00	99.25
053	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak	495,280,000.00	494,720,194.00	559,806.00	99.89
054	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar -	226,400,000.00	224,738,663.00	1,661,337.00	99.27

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Guguk Cino				
056	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao	667,650,000.00	666,980,510.00	669,490.00	99.90
057	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang	517,400,000.00	516,688,050.00	711,950.00	99.86
058	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts.Riau)	1,245,200,000.00	1,244,358,951.00	841,049.00	99.93
059	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur	1,638,950,000.00	1,637,213,633.00	1,736,367.00	99.89
060	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Batas Solok - Sumani	681,400,000.00	680,800,680.00	599,320.00	99.91
061	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Dan Bangunan Pelengkap Jalan	3,938,003,200.00	3,905,192,665.00	32,810,535.00	99.17
062	Penanganan Kritis dan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan Provinsi (ULG)	1,052,800,000.00	1,013,600,666.00	39,199,334.00	96.28
063	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang	488,900,000.00	486,358,500.00	2,541,500.00	99.48
064	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus	75,000,000.00	74,185,700.00	814,300.00	98.91
066	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Sikabau - Sp. Koto Baru	791,760,000.00	791,170,361.00	589,639.00	99.93
068	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis	310,280,000.00	309,920,822.00	359,178.00	99.88
069	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai	434,400,000.00	432,409,785.00	1,990,215.00	99.54
071	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh	284,650,000.00	284,162,584.00	487,416.00	99.83

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
072	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai	1,763,900,000.00	1,763,429,750.00	470,250.00	99.97
073	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Sikaping	551,530,000.00	551,113,800.00	416,200.00	99.92
074	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo	51,250,000.00	50,874,560.00	375,440.00	99.27
1.01.03.1.01.03.01.034	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	3,735,168,000.00	3,705,302,724.00	29,865,276.00	99.20
001	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan	3,180,450,000.00	3,160,861,922.00	19,588,078.00	99.38
002	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	416,966,000.00	409,354,756.00	7,611,244.00	98.17
004	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Laboratorium Ke Binamargaan	137,752,000.00	135,086,046.00	2,665,954.00	98.06
1.01.03.1.01.03.01.035	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	913,790,000.00	801,506,936.00	112,283,064.00	87.71
003	Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh	242,550,000.00	227,090,850.00	15,459,150.00	93.63
005	Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh	224,898,000.00	205,028,783.00	19,869,217.00	91.17
008	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	446,342,000.00	369,387,303.00	76,954,697.00	82.76
1.01.03.1.01.03.01.036	PROGRAM PENYELENGGARAAN PBL DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	214,708,096,624.00	163,126,937,373.00	51,581,159,251.00	75.98
002	Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung	826,831,050.00	713,536,111.00	113,294,939.00	86.30
003	Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	497,153,700.00	411,454,960.00	85,698,740.00	82.76

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
004	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)	30,487,863,000.00	30,156,578,940.00	331,284,060.00	98.91
005	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	1,203,118,000.00	1,197,808,600.00	5,309,400.00	99.56
007	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	206,144,000.00	168,808,900.00	37,335,100.00	81.89
009	Pembangunan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat	496,790,250.00	412,766,500.00	84,023,750.00	83.09
010	Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat	113,244,500.00	106,688,950.00	6,555,550.00	94.21
013	Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	628,613,200.00	596,003,707.00	32,609,493.00	94.81
015	Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan)	1,581,482,530.00	1,578,942,030.00	2,540,500.00	99.84
016	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Musholla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan)	500,000,000.00	468,079,018.00	31,920,982.00	93.62
019	Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	555,563,750.00	285,422,918.00	270,140,832.00	51.38
020	Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	4,373,619,500.00	4,321,415,000.00	52,204,500.00	98.81
022	Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Di Komplek Gubernur (lanjutan)	146,646,950.00	113,762,160.00	32,884,790.00	77.58
025	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati	3,926,518,700.00	3,924,558,300.00	1,960,400.00	99.95
026	Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat	171,766,000.00	160,316,433.00	11,449,567.00	93.33
027	Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang	18,611,488,000.00	16,696,589,950.00	1,914,898,050.00	89.71
028	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	148,500,707,309.00	100,018,727,639.00	48,481,979,670.00	67.35
029	Pembangunan Guest House Gubernur	976,156,000.00	974,600,700.00	1,555,300.00	99.84
030	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	405,547,000.00	325,672,722.00	79,874,278.00	80.30
031	Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur	98,843,185.00	98,665,685.00	177,500.00	99.82
032	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100,000,000.00	99,163,600.00	836,400.00	99.16

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
033	Dukungan Pelaksanaan MTQ Nasional	300,000,000.00	297,374,550.00	2,625,450.00	99.12
1.01.03.1.01.03.01.037	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	773,788,000.00	605,953,577.00	167,834,423.00	78.31
001	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	274,180,000.00	222,363,100.00	51,816,900.00	81.10
012	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-
023	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	424,608,000.00	383,590,477.00	41,017,523.00	90.34
1.01.03.1.01.03.01.038	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4,733,380,000.00	4,090,939,998.00	642,440,002.00	86.43
001	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	129,180,000.00	92,222,400.00	36,957,600.00	71.39
003	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	1,064,378,000.00	784,969,750.00	279,408,250.00	73.75
004	Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	357,406,000.00	315,982,278.00	41,423,722.00	88.41
006	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	597,616,000.00	489,523,441.00	108,092,559.00	81.91
009	Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota (lanjutan)	1,615,160,000.00	1,500,950,893.00	114,209,107.00	92.93
011	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang	533,200,000.00	483,756,588.00	49,443,412.00	90.73
012	Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	436,440,000.00	423,534,648.00	12,905,352.00	97.04
1.01.03.1.01.03.01.039	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	424,759,000.00	410,989,119.00	13,769,881.00	96.76
008	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Balai Pengujian Konstruksi)	220,357,000.00	214,910,354.00	5,446,646.00	97.53

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
009	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Workshop dan Peralatan)	204,402,000.00	196,078,765.00	8,323,235.00	95.93
1.01.03.1.01.03.01.040	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,638,277,400.00	1,478,956,569.00	159,320,831.00	90.28
001	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	157,350,000.00	148,848,150.00	8,501,850.00	94.60
002	Pembangunan SPAM Regional Kab.Solok dan Kota Solok	482,595,800.00	468,882,255.00	13,713,545.00	97.16
006	Pembangunan SPAM Regional Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman	486,872,600.00	477,408,480.00	9,464,120.00	98.06
008	Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar	100,000,000.00	3,972,000.00	96,028,000.00	3.97
011	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	311,459,000.00	280,535,284.00	30,923,716.00	90.07
013	Pengembangan SPAM Regional Kab. Agam - Bukittinggi (lanjutan)	100,000,000.00	99,310,400.00	689,600.00	99.31
1.01.03.1.01.03.01.041	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	4,805,000,000.00	4,744,636,685.00	60,363,315.00	98.74
001	Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi - Kab. Agam (lanjutan)	100,000,000.00	97,839,800.00	2,160,200.00	97.84
002	Pembangunan Drainase Kab. Padang Pariaman	150,000,000.00	147,060,850.00	2,939,150.00	98.04
004	Pembangunan Drainase Kab. Solok dan Kota Solok	2,755,000,000.00	2,725,012,635.00	29,987,365.00	98.91
005	Pembangunan Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1,800,000,000.00	1,774,723,400.00	25,276,600.00	98.60
042	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	182,620,000.00	146,956,724.00	35,663,276.00	80.47
001	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota	116,120,000.00	103,811,062.00	12,308,938.00	89.40
003	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	66,500,000.00	43,145,662.00	23,354,338.00	64.88

2.2 Outcome Program

Dengan dilaksanakannya program/kegiatan yang mendukung urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 maka diperoleh hasil (*outcome*) sebagai berikut :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran (1.01.1.01.03.01.001)**, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 5.495.289.048,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.444.171.352,- (99,07 %). Program ini berisikan kegiatan rutin dengan *outcome* terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran antara lain meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat ; terpenuhinya kebutuhan layanan jasa komunikasi, air, sumber daya listrik ; tercipta kebersihan lingkungan, keamanan kantor serta tersedianya tenaga supir kantor ; terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor ; terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ; meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan ; terpenuhinya kebutuhan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah serta tercapainya pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi hasil pembangunan kepada masyarakat.
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.01.1.01.03.01.002)**, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 6.619.374.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.507.910.789,- (98,32 %). Program ini berisikan kegiatan dengan *outcome* terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti terpenuhinya kebutuhan komputer dan jaringan komputerisasi ; terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ; terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional ; meningkatnya kondisi rumah dinas Kadis ; terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya 1 ruangan laktasi dan posko jaga security ; terpeliharanya

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor ; terpenuhinya pengadaan dan bertambahnya kendaraan dinas operasional.

3. **Program peningkatan disiplin aparatur (1.01.1.01.03.01.003)**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung dengan anggaran Rp. 275.352.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 271.272.000,- (98.52 %). *Outcome* dari program/kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian semua PNS yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.
4. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (1.01.1.01.03.01.004)**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung dengan anggaran Rp. 264.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 254.909.897,- (96.27 %). *Outcome* dari program/kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparatur terhadap peraturan dan perundang-undangan.
5. **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.01.1.01.03.01.005)**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 1.661.967.928,-, dengan realisasi sebesar Rp. 1.503.281.379,- (90,45 %). Program ini berisikan kegiatan dengan *outcome* antara lain terpenuhinya penyusunan RKA dan DPA SKPD Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ; terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD ; tersusunnya / tersedianya laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD) serta tersedianya laporan evaluasi kinerja dan pelaporan program tahunan.
6. **Program pembangunan jalan dan jembatan (1.01.03.1.01.03.01.032)**, terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 184.577.512.989,-, dengan realisasi sebesar Rp. 154.051.894.972,06 (83,46 %). Program ini berisikan kegiatan dengan *outcome* peningkatan kualitas dan kuantitas sarana jalan dan jembatan untuk ekonomi rakyat di provinsi Sumatera Barat dengan capaian kemantapan jalan provinsi Sumbar pada tahun

2019 sebesar 73,015% dan total panjang jalan mantap pada tahun 2019 sepanjang 1113,628 Km (sumber : laporan akhir survey IRMS tahun 2019).

7. **Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan (1.01.03.1.01.03.01.033)**, terdiri dari 58 (lima puluh delapan) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 48.377.347.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.955.031.970,60 (99,13 %). Program ini berisikan kegiatan dengan *outcome* yang diperoleh adalah terpeliharanya kondisi kemantapan jalan provinsi di 53 ruas dengan total panjang jalan mantap pada tahun 2019 sepanjang 1113,628 Km (berdasarkan survey IRMS) ; terlaksananya pengadaan 2 Unit Back Hoe Loader dan 1 Unit Excavator Mini, 1 paket Armco ; terpeliharanya peralatan jalan&jembatan sebanyak 64 unit ; terpeliharanya jembatan provinsi dan bangunan pelengkap jalan sepanjang 74.8 m dan terlaksananya penanganan kritis serta ULG di 10 wilayah.
8. **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (1.01.03.1.01.03.01.034)**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 3.735.168.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.705.302.724,- (99,20 %). *Outcome* dari kegiatan yang mendukung program ini adalah meningkatnya mutu pelayanan dan kinerja laboratorium UPTD dengan tersedianya peralatan laboratorium seperti 2 unit *Drilling Machine* ; Alat Laboratorium Geoteknik ; Alat Laboratorium Beton, Aspal, dan agregat ; Alat Pengujian TABG ; alat Pengolah Data Laboratorium dan Alat *Soil Test* serta meningkatnya mutu bahan untuk pelaksanaan pekerjaan ke PU-an.
9. **Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah (1.01.03.1.01.03.01.035)**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 913.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 801.506.936,- (87,71 %). *Outcome* dari kegiatan yang mendukung program ini adalah tersedianya 1 (satu) dokumen DED Pengembangan

TPA Sampah Regional Payakumbuh , tersedianya 1 (satu) Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh dan meningkatnya Kinerja Sanimas IDB dan PPSP Kab/Kota.

10. ***Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (1.01.03.1.01.03.01.036)***, terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 214.708.096.624,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.126.937.373,- (75,98 %). *Outcome* dari kegiatan yang ada pada program ini antara lain meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan meliputi Terlaksananya Informasi Teknis Keciptakarya dan Konsultasi Teknis ; Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat ; tersedianya gedung kebudayaan provinsi sumbar ; Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara ; Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat ; Tersedianya DED dan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat ; dengan terlaksananya Review Dokumen Perencanaan dan Dokumen Andalalin maka akan berdampak terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat ; Terlaksananya Pembinaan TABG ke seluruh kabupaten/kota ; Tersedianya Shelter Evakuasi Tsunami di Mushalla Jabal Rahmah Painan ; Tersedianya Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat ; tersedianya Lapangan Tenis Indoor di Komplek Gubernur ; Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati ; Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat ; Terbangunnya Gedung Kantor Samsat Kota Padang ; tersedianya stadium utama provinsi sumbar ; tersedianya Guest House Gubernur.
11. ***Program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (1.01.03.1.01.03.01.037)***, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang mendukung

dengan total anggaran Rp. 773.788.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 605.953.577,- (78,31 %). *Outcome* dari kegiatan yang ada pada program ini adalah meningkatnya pemahaman & pengetahuan pelaku jasa konstruksi terhadap aturan-aturan yang ada di bidang jasa konstruksi dan ASN selaku owner yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

12. ***Program Perencanaan Penataan Ruang (1.01.03.1.01.03.01.038)***, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung dengan anggaran total Rp. 4.733.380.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.090.939.998,- (86.43 %). *Outcome* dari kegiatan yang mendukung program ini adalah tercapainya kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih baik serta meningkatnya Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap penataan ruang.
13. ***Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (1.01.03.1.01.03.01.039)***, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 424.759.000,- dan realisasi sebesar Rp. 410.989.119,- (96,76 %). *Outcome* dari kegiatan yang mendukung program ini adalah meningkatnya kinerja UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPTD Workshop & Peralatan.
14. ***Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota (1.01.03.1.01.03.01.040)***, terdiri dari oleh 6 (enam) kegiatan yang mendukung dengan anggaran Rp. 1.638.277.400,- dan realisasi sebesar Rp. 1.478.956.569 (90,28 %). *Outcome* dari kegiatan yang mendukung program ini adalah meningkatnya pengelolaan & pengembangan jaringan air minum masyarakat.
15. ***Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi (1.01.03.1.01.03.01.041)***, terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 4.805.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.744.636.685,- (98,74 %). *Outcome* dari kegiatan ini adalah meningkatnya Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi

dengan terbangunnya drainase lintas kab/kota.

16. **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1.01.03.1.01.03.01.042)**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung dengan total anggaran Rp. 182.620.000,- dan realisasi sebesar Rp. 146.956.724,- (80.47 %). *Outcome* dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang ke arah yang lebih baik.

2.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, juga dapat dilihat dari realisasi capaian indikator Pemerintah Daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Keputusan Gubernur Nomor 065- 1038-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 Tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Desember 2018. Adapun realisasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah yang dimaksud ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Realisasi Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Jalan Mantap	73%	73,015 %	100,02%
2.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan	3 unit	3 unit	100,00 %
3.	Persentase Cakupan Air Minum	80%	78,65%	98,31%
4.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	78%	79,78%	102,28%
5.	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	83%	84%	101,20%

Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2.3.1 Persentase Jalan Mantap

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 73 %. Berdasarkan laporan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2019 sebesar 73,015%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi ini untuk tahun 2019 seperti ditampilkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pengukuran Target Kinerja Kemantapan Jalan Dinas PUPR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	73%	73.015 %	100.02%

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2019

Perhitungan Persentase capaian kinerja kemantapan jalan provinsi sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{73,015}{73,000} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,02 \%$$

Dengan pencapaian atas target sebesar 100,02% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase kemantapan jalan provinsi adalah Sangat Baik.

Berdasarkan IKU Gubernur Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa penetapan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap diukur berdasarkan jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatra Barat dengan kondisi mantap $\geq 72\%$.

Dari laporan hasil survey IRMS yang dilakukan diketahui bahwa jumlah ruas jalan yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ adalah sebanyak 40 ruas seperti ditampilkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pengukuran Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	40	108.11

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2019

Perhitungan Persentase capaian kinerja jumlah ruas jalan yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{40}{37} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 108,11 \%$$

Dengan pencapaian atas target sebesar 108,11% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi Kondisi Mantap adalah Sangat Baik.

Data kemantapan jalan provinsi tahun 2019 diperoleh dari hasil survey IRMS (*Integrated Road Management System*) dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Kondisi Jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NAMA PROPINSI	PANJANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
		BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
		(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
SUMATERA BARAT	1525.200	226.888	14.876	886.740	58.139	150.200	9.848	261.372	17.137	1113.628	73.015	411.572	26.985

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2019

Tabel 2.6. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2019

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
1	13.007	SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU	11.080	2.100	18.953	8.580	77.437	0.400	3.610	0.000	0.000	10.680	96.390	0.400	3.610
2	13.008	TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG	20.000	4.900	24.500	13.200	66.000	1.700	8.500	0.200	1.000	18.100	90.500	1.900	9.500
3	13.010	SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU	29.000	1.300	4.483	23.200	80.000	2.700	9.310	1.800	6.207	24.500	84.483	4.500	15.517
4	13.011	SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU	11.900	0.700	5.882	9.500	79.832	1.600	13.445	0.100	0.840	10.200	85.714	1.700	14.286

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
5	13.012	SIMP.KOTO BARU - JUNCTION	5.400	0.700	12.963	4.000	74.074	0.700	12.963	0.000	0.000	4.700	87.037	0.700	12.963
6	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	7.300	3.600	49.315	3.300	45.205	0.200	2.740	0.200	2.740	6.900	94.521	0.400	5.479
7	06.025	MANGGOPOH - PADANG LUAR	69.430	11.000	15.843	37.530	54.054	19.900	28.662	1.000	1.440	48.530	69.898	20.900	30.102
8	06.028	SICINCIN - KURAITAJI	16.440	2.100	12.774	12.740	77.494	1.600	9.732	0.000	0.000	14.840	90.268	1.600	9.732
9	013.031	PANTI - SIMPANG EMPAT	74.230	3.600	4.850	59.730	80.466	9.700	13.067	1.200	1.617	63.330	85.316	10.900	14.684
10	06.033	SIMP. EMPAT - SASAK	20.000	2.500	12.500	14.800	74.000	2.700	13.500	0.000	0.000	17.300	86.500	2.700	13.500
11	06.034.2	AIR BALAM - AIR BANGIS	12.600	0.800	6.349	11.720	93.016	0.080	0.635	0.000	0.000	12.520	99.365	0.080	0.635
12	06.035	KUBU KERAMBIL - BATUSANGKAR	18.500	2.000	10.811	12.900	69.730	3.600	19.459	0.000	0.000	14.900	80.541	3.600	19.459
13	06.036	BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA)	28.790	3.000	10.420	22.990	79.854	2.800	9.726	0.000	0.000	25.990	90.274	2.800	9.726
14	06.037	BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO	10.400	4.400	42.308	5.100	49.038	0.900	8.654	0.000	0.000	9.500	91.346	0.900	8.654
15	06.038.2	GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA)	30.600	0.500	1.634	27.100	88.562	2.600	8.497	0.400	1.307	27.600	90.196	3.000	9.804
16	06.039	GUGUK CINO - SITANGKAI	15.120	0.000	0.000	12.920	85.450	1.700	11.243	0.500	3.307	12.920	85.450	2.200	14.550
17	06.040	SITANGKAI - TANJUNG AMPALU	17.280	4.300	24.884	10.500	60.764	2.480	14.352	0.000	0.000	14.800	85.648	2.480	14.352
18	06.044	BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	50.610	4.600	9.089	37.710	74.511	7.700	15.214	0.600	1.186	42.310	83.600	8.300	16.400

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
19	06.054	JUNCTION - ABAISIAT	12.600	2.600	20.635	9.800	77.778	0.200	1.587	0.000	0.000	12.400	98.413	0.200	1.587
20	06.055	SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG	4.400	0.000	0.000	4.100	93.182	0.300	6.818	0.000	0.000	4.100	93.182	0.300	6.818
21	06.056.1	SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO	20.000	8.300	41.500	7.970	39.850	1.700	8.500	2.030	10.150	16.270	81.350	3.730	18.650
22	06.056.2	LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR	17.000	0.100	0.588	11.200	65.882	3.600	21.176	2.100	12.353	11.300	66.471	5.700	33.529
23	06.056.3	ABAI SANGIR - SEI DAREH	74.000	2.700	3.649	33.120	44.757	7.300	9.865	30.880	41.730	35.820	48.405	38.180	51.595
24	06.068	PADANGSAWAH - KUMPULAN	36.500	8.600	23.562	22.810	62.493	4.800	13.151	0.290	0.795	31.410	86.055	5.090	13.945
25	06.069.2	BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	46.850	7.000	14.941	33.350	71.185	6.200	13.234	0.300	0.640	40.350	86.126	6.500	13.874
26	06.070	BATUSANGKAR - OMBILIN	18.510	2.800	15.127	13.800	74.554	1.900	10.265	0.010	0.054	16.600	89.681	1.910	10.319
27	06.071	SOLOK- ALAHAN PANJANG	47.800	5.700	11.925	35.300	73.849	5.700	11.925	1.100	2.301	41.000	85.774	6.800	14.226
28	06.072	LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU	30.900	5.100	16.505	20.700	66.990	5.100	16.505	0.000	0.000	25.800	83.495	5.100	16.505
29	06.073	PASAR BARU - ALAHAN PANJANG	49.400	1.300	2.632	27.755	56.184	9.100	18.421	11.245	22.763	29.055	58.816	20.345	41.184
30	06.075	SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN	20.500	10.100	49.268	8.720	42.537	1.500	7.317	0.180	0.878	18.820	91.805	1.680	8.195
31	06.076	PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR	73.950	4.600	6.220	46.340	62.664	2.100	2.840	20.910	28.276	50.940	68.884	23.010	31.116
32	06.078	SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA	39.400	32.000	81.218	7.150	18.147	0.000	0.000	0.250	0.635	39.150	99.365	0.250	0.635
33	06.079	SIMP BASO - PILADANG	11.140	2.600	23.339	4.640	41.652	1.900	17.056	2.000	17.953	7.240	64.991	3.900	35.009

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
34	06.080	MATUR - PALEMBAYAN	20.700	3.800	18.357	13.400	64.734	2.700	13.043	0.800	3.865	17.200	83.092	3.500	16.908
35	06.081	PALEMBAYAN - PALUPUH (SIMP.PATAI)	13.300	0.300	2.256	12.000	90.226	1.000	7.519	0.000	0.000	12.300	92.481	1.000	7.519
36	06.082	ALAHAN PANJANG - KILIRAN JAO	72.900	0.938	1.287	33.480	45.926	7.900	10.837	30.582	41.951	34.418	47.213	38.482	52.787
37	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN	44.100	17.800	40.363	25.900	58.730	0.400	0.907	0.000	0.000	43.700	99.093	0.400	0.907
38	06.084	JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH)	14.170	6.000	42.343	7.170	50.600	1.000	7.057	0.000	0.000	13.170	92.943	1.000	7.057
39	06.085	SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL)	2.050	0.000	0.000	2.000	97.561	0.050	2.439	0.000	0.000	2.000	97.561	0.050	2.439
40	06.086	SURANTIAH - KAYU ARO - LANGGAI	27.700	0.600	2.166	16.100	58.123	1.200	4.332	9.800	35.379	16.700	60.289	11.000	39.711
41	06.087	DUKU - SICINCIN	28.650	1.000	3.490	8.000	27.923	0.500	1.745	19.150	66.841	9.000	31.414	19.650	68.586
42	06.088	PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN	31.000	3.600	11.613	20.800	67.097	3.700	11.935	2.900	9.355	24.400	78.710	6.600	21.290
43	06.089	JL. BALINGKA - TEROWONGAN - NGARAI SIANOK	9.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.700	100.000	0.000	0.000	9.700	100.000
44	06.090	PALUPUAH - PUA GADIH - KOTO TINGGI	25.000	1.000	4.000	9.460	37.840	4.790	19.160	9.750	39.000	10.460	41.840	14.540	58.160
45	06.091	SIMPANG NAPAL - BUKIT BUAL - TANJUNG AMPALU	23.000	0.300	1.304	5.700	24.783	0.500	2.174	16.500	71.739	6.000	26.087	17.000	73.913
46	06.092	SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI	28.400	10.100	35.563	17.500	61.620	0.800	2.817	0.000	0.000	27.600	97.183	0.800	2.817

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
47	06.093	SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING	30.000	2.200	7.333	22.700	75.667	2.500	8.333	2.600	8.667	24.900	83.000	5.100	17.000
48	06.094	PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO	5.500	5.200	94.545	0.255	4.636	0.000	0.000	0.045	0.818	5.455	99.182	0.045	0.818
49	06.095	RAO - ROKAN (BATAS RIAU)	33.000	7.900	23.939	21.850	66.212	2.900	8.788	0.350	1.061	29.750	90.152	3.250	9.848
50	06.096	LUBUK SIKAPING - TALU	28.000	3.200	11.429	15.300	54.643	0.300	1.071	9.200	32.857	18.500	66.071	9.500	33.929
51	06.097	BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG	43.200	7.750	17.940	5.450	12.616	0.500	1.157	29.500	68.287	13.200	30.556	30.000	69.444
52	06.098	TELUK BAYUR - NIPAH - PURUS	12.000	3.700	30.833	7.150	59.583	0.000	0.000	1.150	9.583	10.850	90.417	1.150	9.583
53	06.099	PURUS - BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU	16.000	0.500	3.125	1.700	10.625	0.000	0.000	13.800	86.250	2.200	13.750	13.800	86.250
54	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1.200	0.300	25.000	0.750	62.500	0.100	8.333	0.050	4.167	1.050	87.500	0.150	12.500
55	06.101	TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR	47.000	0.700	1.489	20.000	42.553	0.700	1.489	25.600	54.468	20.700	44.043	26.300	55.957
56	06.102	RAWANG - TALAWI	6.000	0.100	1.667	2.800	46.667	0.500	8.333	2.600	43.333	2.900	48.333	3.100	51.667
57	06.103	SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT	5.100	4.300	84.314	0.000	0.000	0.800	15.686	0.000	0.000	4.300	84.314	0.800	15.686
58	06.104	KANTOR CAMAT - BERKAT	5.900	0.000	0.000	3.000	50.847	2.900	49.153	0.000	0.000	3.000	50.847	2.900	49.153
TOTAL			1525.200	226.888	14.876	886.740	58.139	150.200	9.848	261.372	17.137	1113.628	73.015	411.572	26.985

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2019

2.3.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan

Sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan terbagi atas Bangunan Strategis, Gedung Negara, Rumah Negara dan Shelter. Adapun indikator Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan didefinisikan sebagai “sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang telah selesai dibangun dan siap ditempati pada Tahun 2019”. Sedangkan bangunan yang masih sedang dalam proses pembangunan dan lanjutan tidak dihitung sebagai indikator pada sasaran ini.

Pada Tahun 2019 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan 3 sarana dan prasarana tata pemerintahan. Dan realisasinya sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang dimaksud yaitu :

1. Gedung samsat kota padang
2. Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat
3. Shelter Evakuasi Tsunami di Mushalla Jabal Rahmah Painan

Perhitungan persentase capaian sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan, adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{3}{3} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100 \%$$

Dengan pencapaian atas target sebesar 100% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase sarana & prasarana penunjang tata pemerintahan provinsi Sumatera Barat adalah Sangat Baik.

2.3.3 Cakupan Air Minum

Cakupan air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional. Pada Tahun 2019 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan capaian sebesar 80% untuk cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.7. Target dan Capaian Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur layanan Dasar Masyarakat	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	80%	78,65%	98,31 %

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Rekapitulasi Data Cakupan Air Minum) per kab/kota di Sumatera Barat

Perhitungan persentase capaian cakupan layanan air minum, adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{78,65}{80} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 98,31 \%$$

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat capaian persentase cakupan air minum pada Tahun 2019 adalah sebesar 78,65 %, lebih kecil dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 80%. Meskipun demikian, dengan pencapaian atas target sebesar 98,31 % tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase cakupan air minum provinsi adalah Sangat Baik. Untuk mencapai target pemenuhan cakupan air minum, pada prinsipnya merupakan program/kegiatan yang terdapat di kabupaten/kota. Data capaian air minum provinsi Sumatera Barat bersumber dari data PDAM dan kegiatan Pamsimas yang ada di Provinsi seperti ditunjukkan pada tabel 2.8. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat hanya melakukan pembinaan dan mengelola-mengembangkan SPAM lintas daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.8. Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat s/d tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR
			JARINGAN PERPIPAAN				NON PERPIPAAN						
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	NAGARI/KEL
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
	SUMBAR	5,060,063	1,909,509	37.74	561,316	11.09	1,509,058	29.82	3,979,882	78.65	1,080,181	21.35	139
1	Kab. Agam	466,978	145,330	31.12	60,152	12.88	174,837	37.44	380,319	81.44	86,659	18.56	5
2													
2	Kab. Dharmasraya	209,123	2,282	1.09	16,120	7.71	128,818	61.60	147,220	70.40	61,903	29.60	7
3	Kab. Kepulauan Mentawai	82,751	4,849	5.86	7,788	9.41	10,958	13.24	23,595	28.51	59,156	71.49	30
4	Kab. Lima Puluh Kota	364,598	59,359	16.28	56,483	15.49	150,988	41.41	266,830	73.18	97,768	26.82	16
5	Kab. Padang Pariaman	380,830	110,689	29.07	26,396	6.93	171,116	44.93	308,200	80.93	72,630	19.07	6

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

6	Kab. Pasaman	263,838	154,201	58.45	38,341	14.53	28,069	10.64	220,611	83.62	43,227	16.38	4
7	Kab. Pasaman Barat	392,781	100,714	25.64	58,844	14.98	176,675	44.98	336,233	85.60	56,548	14.40	5
8	Kab. Pesisir Selatan	442,824	134,411	30.35	27,557	6.22	209,133	47.23	371,100	83.80	71,724	16.20	13
9	Kab. Sijunjung	214,529	71,250	33.21	39,819	18.56	68,665	32.01	179,734	83.78	34,795	16.22	9
10	Kab. Solok	358,382	112,286	31.33	119,994	33.48	44,973	12.55	277,253	77.36	81,129	22.64	13
11	Kab. Solok Selatan	153,942	31,783	20.65	41,328	26.85	52,442	34.07	125,553	81.56	28,389	18.44	8
12	Kab. Tanah Datar	342,864	114,592	33.42	16,405	4.78	139,191	40.60	270,189	78.80	72,675	21.20	4
13	Kota Bukittinggi	118,260	51,002	43.13	505	0.43	24,203	20.47	75,709	64.02	42,551	35.98	8
14	Kota Padang	879,442	592,980	67.43	29,140	3.31	18,860	2.14	640,980	72.88	238,462	27.12	3

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

15	Kota Padang Panjang	48,792	33,736	69.14	-	-	10,559	21.64	44,295	90.78	4,498	9.22	-
16	Kota Pariaman	82,629	7,488	9.06	9,555	11.56	57,588	69.69	74,631	90.32	7,998	9.68	6
17	Kota Payakumbuh	124,057	101,132	81.52	9,228	7.44	11,024	8.89	121,384	97.85	2,673	2.15	-
18	Kota Sawah Lunto	68,626	30,428	44.34	2,948	4.30	23,437	34.15	56,812	82.78	11,814	17.22	2
19	Kota Solok	64,817	50,998	78.68	713	1.10	7,522	11.61	59,234	91.39	5,583	8.61	-

Sumber : PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas

2.3.4 Cakupan Sanitasi

Sebagaimana air minum, sanitasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam *Universal Access*. Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian Persentase Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 78 % dengan realisasi capaian sebesar 79,78 %.

Tabel 2.9. Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Sumatera Barat Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur layanan Dasar Masyarakat	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	78%	79,78%	102,28 %

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat)

Perhitungan persentase capaian cakupan layanan sanitasi, adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{79,78}{78} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 102,28 \%$$

Dengan pencapaian atas target sebesar 102,28% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase cakupan layanan sanitasi provinsi adalah Sangat Baik.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat capaian persentase Rumah tangga bersanitasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 79,78%. Nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 78%. Data cakupan sanitasi diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat seperti ditunjukkan pada tabel 2.10.

Tabel 2.10. Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat Desember 2019

No	Nama Kabupaten	Identitas Data (Jumlah data/keseluruhan*)			Kemajuan								
		Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses PProgres
1	KOTA PAYAKUMBUH	5/5	48/48	31882/24056	30345	95.52	298	1.04	1239	3.44	0	0	100.00
2	KOTA SOLOK	2/2	13/13	18704/14565	17143	92.57	438	2.29	1123	5.14	0	0	100.00
3	KOTA PADANG PANJANG	2/2	16/16	12031/11754	10706	85.41	18	0.15	1307	14.44	0	0	100.00
4	KOTA BUKITTINGGI	3/3	24/24	26057/26779	20540	77.46	3841	15.54	695	3.39	981	3.61	96.39
5	KOTA PADANG	11/11	104/104	207877/197561	178532	82.5	8432	5.49	9343	4.85	11570	7.16	92.84
6	KOTA SAWAH LUNTO	4/4	37/37	16442/15353	13185	81.35	1085	6.11	465	2.46	1707	10.07	89.93
7	KOTA PARIAMAN	4/4	71/71	19919/19418	13145	67.21	3805	17.44	935	5.06	2034	10.3	89.70
8	DHARMASRAYA	11/11	52/52	51355/50276	42541	78.34	3009	6.07	1951	3.86	3854	11.73	88.27
9	PESISIR SELATAN	15/15	182/182	135467/110125	95817	65.04	15258	13.52	8936	8.46	15456	12.98	87.02
10	AGAM	16/16	82/82	111253/118665	50453	47.87	35969	27.71	7758	7.83	17073	16.59	83.41
11	SIJUNJUNG	8/8	62/62	56192/54831	32931	51.67	11086	23.06	3112	7.91	9063	17.36	82.64
12	TANAH DATAR	14/14	75/75	101815/92201	63229	65.75	7038	5.61	5448	5.46	26100	23.18	76.82
13	PASAMAN BARAT	11/11	19/19	90289/92235	36667	42.99	18142	18.49	9441	10.91	26039	27.61	72.39
14	SOLOK	14/14	74/74	88756/94553	38317	41.94	12951	16.59	7414	9.88	30074	31.6	68.40
15	LIMA PULUH KOTA	13/13	79/79	93472/94966	49699	54.17	9091	10.88	652	0.68	34030	34.27	65.73
16	SOLOK SELATAN	7/7	39/39	42267/40298	21119	54.39	2939	8.03	709	1.08	17500	36.5	63.50
17	PADANG PARIAMAN	17/17	60/60	80320/98788	43658	53.31	70	0.09	5968	7.66	30624	38.95	61.05
18	KEPULAUAN MENTAWAI	10/10	43/43	20992/18866	3259	16.75	4179	19.92	2184	10.19	11370	53.14	46.86
19	PASAMAN	12/12	32/37	67482/66373	28648	40.44	563	0.77	4999	7.64	33272	51.15	48.85
	SUMATERA BARAT	179/179	1112/1117	1272572/1241663	789934	61.85	138212	11.67	73679	6.26	270747	20.22	79.78

Sumber data : Dinkes Provinsi Sumatera Barat

2.3.5 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung melalui indikator Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) didukung oleh 2 (dua) program, yaitu :

- a. Program Perencanaan Penataan Ruang
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tabel 2.11. Target dan Capaian Indikator Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	83%	84%	101.20%

Sumber data : Bidang Penataan Ruang

Perhitungan persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang, adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{84}{83} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 101,20 \%$$

Dengan pencapaian atas target sebesar 101,20% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang adalah Sangat Baik.

Dari hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui bahwa sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan, hanya ada 1 indikator yang tidak terpenuhi sesuai target yaitu cakupan layanan air minum dengan

persentase capaian 98,31 % . Akan tetapi, persentase capaian tersebut masih dikategorikan sangat baik.

2.4 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 masih ditemui kendala dan permasalahan. Secara garis besar dari 167 kegiatan yang ada pada tahun 2019, pelaksanaannya sudah sesuai target yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa kegiatan yang memiliki realisasi pencapaian target dibawah 90 % seperti ditampilkan pada tabel 2.12 dan kegiatan lewat tahun anggaran 2019 ditampilkan pada tabel 2.13.

Tabel 2.12. Kegiatan Dengan Realisasi di bawah 90%

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	ANGGARAN		
		Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,661,967,928.00	1,503,281,379.00	158,686,549.00	90.45
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	270,806,000.00	234,089,105.00	36,716,895.00	86.44
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	184,714,000.00	166,180,062.00	18,533,938.00	89.97
3	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	207,187,928.00	177,694,470.00	29,493,458.00	85.76
II	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	184,577,512,989.00	154,051,894,972.06	30,525,618,016.94	83.46
1	Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	19,858,130,489.00	10,122,707,298.06	9,735,423,190.94	50.98
2	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	67,100,000.00	47,062,278.00	20,037,722.00	70.14
3	Pembangunan Jembatan Lolong (P. 089)	16,124,400,000.00	6,607,886,950.00	9,516,513,050.00	40.98
4	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	600,204,000.00	528,181,071.00	72,022,929.00	88.00
5	Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	50,486,625,000.00	40,645,170,462.00	9,841,454,538.00	80.51
6	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provi	2,155,916,000.00	1,813,663,901.00	342,252,099.00	84.12
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	913,790,000.00	801,506,936.00	112,283,064.00	87.71
1	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	446,342,000.00	369,387,303.00	76,954,697.00	82.76
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PBL DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	214,708,096,624.00	163,126,937,373.00	51,581,159,251.00	75.98
1	Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung	826,831,050.00	713,536,111.00	113,294,939.00	86.30
2	Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	497,153,700.00	411,454,960.00	85,698,740.00	82.76
3	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	206,144,000.00	168,808,900.00	37,335,100.00	81.89
4	Pembangunan Gedung Kantor PPIPTK Provinsi Sumatera Barat	496,790,250.00	412,766,500.00	84,023,750.00	83.09
5	Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	555,563,750.00	285,422,918.00	270,140,832.00	51.38
6	Pembangunan Lapangan Tennis Indoor Di Komplek Gubernuran (lanjutan)	146,646,950.00	113,762,160.00	32,884,790.00	77.58
7	Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang	18,611,488,000.00	16,696,589,950.00	1,914,898,050.00	89.71
8	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	148,500,707,309.00	100,018,727,639.00	48,481,979,670.00	67.35
9	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	405,547,000.00	325,672,722.00	79,874,278.00	80.30
V	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	773,788,000.00	605,953,577.00	167,834,423.00	78.31
1	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	274,180,000.00	222,363,100.00	51,816,900.00	81.10
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-
VI	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4,733,380,000.00	4,090,939,998.00	642,440,002.00	86.43
1	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	129,180,000.00	92,222,400.00	36,957,600.00	71.39
2	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	1,064,378,000.00	784,969,750.00	279,408,250.00	73.75
3	Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	357,406,000.00	315,982,278.00	41,423,722.00	88.41
4	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	597,616,000.00	489,523,441.00	108,092,559.00	81.91
VII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,638,277,400.00	1,478,956,569.00	159,320,831.00	90.28
1	Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar	100,000,000.00	3,972,000.00	96,028,000.00	3.97
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	182,620,000.00	146,956,724.00	35,663,276.00	80.47
1	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota	116,120,000.00	103,811,062.00	12,308,938.00	89.40
2	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	66,500,000.00	43,145,662.00	23,354,338.00	64.88

Tabel 2.13. Kegiatan Lewat Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI			NILAI KONTRAK /ADDENDUM	SISA
		PAGU DPA AWAL	PAGU DPA PERUBAHAN	FISIK (%)	KEUANGAN (Rupiah)	KEUANGAN (%)		
1	PEMBANGUNAN JEMBATAN LOLONG (P.099)							
	Paket Pembangunan Jembatan Lolong (P.099)	19,194,605,000	15,424,481,000	60.46	5,923,021,050	57.43	10,313,123,000.00	4,390,101,950
2	PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DAK (PENDAMPING)							
	Paket Pembangunan Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang DAK (P.097) Kab. Pasaman Barat	6,753,948,000	6,753,948,000	94.33	4,916,574,790	89.61	5,486,689,000.00	570,114,210
3	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR (P.101)							
	Paket Pembangunan Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)	6,509,536,000	5,579,799,100	94.79	5,025,037,350	90.06	5,579,799,000.00	554,761,650
4	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT							
	Paket 1 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Simpang Padang Aro-Sei Dareh	450,000,000	447,040,000	73.50	326,512,725	73.50	444,235,000.00	117,722,275
	Paket 2 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Pangkalan Koto Baru Tapus	500,000,000	491,782,500	79.01	386,650,000	79.01	489,362,500.00	102,712,500
	Paket 3 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi	250,000,000	248,033,500	65.93	138,964,000	65.93	210,778,260.00	71,814,260
5	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGI DAERAH PROVINSI LINTAS DAERAH KABUPATEN /KOTA							
	Pembangunan Gedung SAMSAT Kota Padang	19.974.631.000	18.142.280.000	94.20	17.090.308.260	94.20		1.051.971.740
	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat Tahap V	168.314.715.000	140.192.004.621	60.58	84.924.131.781	60.58		55.267.872.840

Adapun penyebab rendahnya pencapaian target masing – masing kegiatan yang dimaksud pada Tabel 2.12 beserta solusinya adalah sebagai berikut :

1. *Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD*

Penyebabnya adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan mensurvey kegiatan yang diusulkan pada perubahan dan dianggarkan pada APBD 2020, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

Solusinya adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

2. *Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

Penyebabnya adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

Solusinya adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

3. *Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD*

Penyebabnya adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan memonitoring kegiatan-kegiatan fisik dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

Solusinya adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

4. *Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an*

Penyebabnya :

Penyerapan Dana rendah karena kendala permasalahan lahan sebagai berikut :

a.) Abdulrahman pemilik lahan pada Oprit Jembatan I, Sudah setuju dengan Nilai Appraisal yaitu sebesar Rp. 1.429.800.000,- akan tetapi Abdulrahman tersebut digugat oleh pihak kaumnya sehingga berperkara di Pengadilan.

b.) Erni pemilik lahan pada Oprit Jembatan II tidak setuju sama sekali dan tidak mau menerima undangan rapat, sehingga tidak didapati koordinasi yang jelas. Dan Erni ini menetap di daerah Bogor. Menurut Ketua Panitia dari Badan

Pertanahan Kota Padang ini akan di Konsinyasi ke Pengadilan dengan nilai Sebesar Rp. 783.000.000,-.

c.) Endarfi Datuk Tanali pemilik lahan menuju jalan Dr. M.Hatta. Mereka tidak setuju dengan nilai Appraisal dan tanahnya dibuat 3 zona, sehingga mereka tidak setuju dengan nilai Appraisal sebesar Rp. 4.545.500.000,-. Sekarang mereka mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia dan Konsultan Penilai Appraisal.

Ketiga pemilik lahan ini dikonsinyasi ke Pengadilan Negeri Padang oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan.

Pengadaan Lahan Duku – Sicincin

Pemilik lahan atas nama **Renoani** di gugat oleh kaumnya di Pengadilan Negeri Pariaman termasuk Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat oleh **HK. Dt. Tampang Hulu** pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor Perdata 56/Pdt.G/2019/PN.PRM. Sehingga dibuatkan Perjanjian akan dibayarkan pada Anggaran Tahun 2020.

Pengadaan Lahan Teluk Kabung Mandeh

Beberapa orang yang datanya belum lengkap disebabkan sertifikatnya tergadaikan di Bank, antara lain:

1. **No Name** total nilai sebesar Rp. 45.439.583,- ini digugat oleh orang yang berhak pula untuk menerima Ganti Kerugian.
2. **Trisnawati** total nilai sebesar Rp. 647.595,- ini sertifikatnya tergadai di Bank BRI.
3. **Nurleli** total nilai sebesar Rp. 7.647.413,- ini sertifikatnya tergadai di Bank.
4. **Susi Nirta** total nilai sebesar Rp. 3.143.205,- ini sertifikatnya tergadai di Bank.

5. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum

Penyebabnya :

Keterbatasan jumlah kendaraan operasional dinas dalam melakukan perjalanan dinas untuk melakukan monitoring dan pengawasan pekerjaan.

Solusinya adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020

6. Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)

Penyebabnya adalah :

- Jebolnya Cek Dam/Tanggul Pengaman Pekerjaan Jembatan Akibat Abrasi Sepanjang Pantai Padang Sehingga Akitifitas Terhenti ± 10 Hari Kalender

- Pada abutment 1 (kec. padang barat) pelaksanaan pekerjaannya hanya dapat dilakukan sampai jam 3 sore karena dilarang oleh masyarakat berdagang/lahan parkir dengan alasan mereka mencari makan, dan itu dengan syarat harus separoh-separoh digali dan material pengganti sudah ditumpuk

Solusinya adalah menambah waktu pelaksanaan kegiatan melewati tahun anggaran sehingga diharapkan pada masa akhir waktu perpanjangan pekerjaan bisa selesai sesuai rencana.

7. *Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi*

Penyebab rendahnya serapan adalah perencanaan awal kegiatan TP4D ada 3 Paket kegiatan, masing-masing pertemuan ada narasumber 6 orang untuk dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, tetapi dalam pelaksanaannya pertemuan tersebut bisa digabung dalam satu kali pertemuan untuk 3 paket kegiatan. Masukan dari Tim TP4D bahwa kegiatan TP4D cukup dengan memberikan laporan bulanan, anggaran yang telah dianggarkan jadi tidak terlaksana.

8. *Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)*

Penyebab rendahnya serapan adalah curah hujan yang tinggi menyebabkan permukaan badan jalan menjadi licin sehingga kendaraan tidak bisa membawa material ke lokasi pekerjaan, hal itu juga menyebabkan terjadinya keterlambatan pada penghamparan dan pemadatan material lainnya.

Solusinya adalah mempercepat progres pelaksanaan dilapangan.

9. *Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat*

Penyebabnya adalah :

- Paket 1 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Simpang Padang Aro – Sei Dareh Persetujuan KA Andam belum diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (menurut Jadwal pada KAK seharusnya paling lambat tanggal 4 November 2019). Dengan demikian, Pekerjaan Paket 1 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Padang Aro – Sei Dareh, akan melewati Tahun Anggaran 2019.
- Paket 2 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Pangkalan Koto Baru – Tapus melewati Tahun Anggaran 2019, dengan alasan perbaikan KA Amdal belum diselesaikan dan belum diserahkan ke Komisi Penyusunan Amdal (KPA) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman, sehingga KA Andam belum disetujui oleh Dinas

Lingkungan Hidup. Dengan demikian maka Dokumen Andal – RKL – RPL belum bisa disusun. Selain itu survei usulan revisi PIPPIB terhadap trase jalan yang melalui Kawasan Hutan Lindung belum dilaksanakan karena sejak tanggal 25 Oktober 2019, penanganan terhadap Survei Kawasan Hutan terhadap area yang masuk kedalam PIPPIB harus ke Kementerian LHK (sebelumnya melalui Dinas Kehutanan Provinsi).

- Paket 3 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Palupuh - Pua Gadih - Kototinggi melewati Tahun Anggaran. Dokumen lingkungan yang diserahkan oleh Konsultan CV. Nabel Engineering Consultant, baru berupa draft/konsep. Dokumen ini harus dibahas dan diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terlebih dahulu, dan diberikan masukan, saran dan perbaikan, melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait di Provinsi dan OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

10. *Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP*

Penyebabnya adalah efisiensi anggaran karena keterbatasan kendaraan operasional.

11. *Lokakarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung*

Penyebabnya adalah Deviasi di Kegiatan TABG sebanyak 5.19% dikarenakan adanya sisa perjalanan dinas Tim yang tidak terealisasi. Deviasi di Kegiatan Lokakarya sebanyak 13.70% dikarenakan biaya transportasi narasumber pusat tidak terealisasi karena narasumber pusat menggunakan biaya perjalanan dinas sendiri berupa uang harian tiket pesawat dan taksinya. *Solusinya* meninjau ulang penganggaran untuk kegiatan ini pada tahun berikutnya.

12. *DED Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat*

Penyebabnya adalah menurut Permen PU No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan (6 tahap) dan kegiatan ini baru sampai pada tahapan penyusunan RKS & RAB, masih tersisa 2 tahapan lagi yaitu Tahap pelelangan penyedia jasa pelaksana konstruksi dan tahap pengawasan berkala.

13. *Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat*

Penyebabnya adalah :

1. Honor Sekretariat PTP dibayar mulai bulan Maret (dalam DPA Januari).
2. Honor Kepala Dinas tidak bisa dibayarkan karena sudah maksimal.

14. *DED Pembangunan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat*

Penyebabnya adalah menurut Permen PU No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan dan kegiatan ini baru sampai pada tahapan penyusunan RKS & RAB, masih tersisa 2 tahapan lagi yaitu Tahap pelelangan penyedia jasa pelaksana konstruksi dan tahap pengawasan berkala.

15. *Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung*

Penyebabnya adalah deviasi dikegiatan Asesment dan SLF sebanyak 48.62% dikarenakan adanya SLF 4 Bangunan yang belum dapat direalisasikan karena SLF Pusat sangat padat dan bangunan yang akan dijadikan sasaran SLF tidak bersedia dilaksanakan (Gedung Hotel dan Kantor).

16. *Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang*

Penyebabnya adalah mobilisasi material terlambat dan kelalaian kontraktor dalam manajemen waktu pelaksanaan kegiatan.

17. *Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)*

Penyebabnya adalah lambatnya produksi atap space, mobilisasi material terganggu dan kelalaian kontraktor dalam manajemen waktu pelaksanaan kegiatan.

18. *Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan*

Penyebabnya adalah Koordinasi pada akhir tahun dengan BKSDA tidak terealisasi karena kegiatan fisik lanjutan ada yang mendesak sehingga fokus beralih ke kegiatan tersebut. Akibatnya dana koordinasi dengan BKSDA tidak terserap.

19. *Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi*

Penyebabnya adalah narasumber pusat untuk sosialisasi keciptakaryaan berhalangan hadir sehingga digantikan dengan narasumber daerah sehingga serapan dana untuk tiket pesawat tidak dibayarkan. Untuk pelatihan K3 Honor

dan tiket pesawat narasumber ditanggung oleh Balai Aceh sehingga serapan dana kegiatan yang ada di Provinsi menjadi rendah.

20. *Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat*

Penyebabnya adalah Instansi yang akan membantu Survey Kepuasan Masyarakat seperti UNP dan UNAND telah memiliki kontrak kerja dengan SKPD lain yang cukup padat pada tahun 2019 sehingga tidak bisa membantu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. *Solusinya* adalah meninjau ulang apakah kegiatan ini masih perlu dianggarkan pada tahun berikutnya atau tidak mengingat tingkat efektifitas kegiatan ini.

21. *Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang*

Penyebab rendahnya serapan anggaran adalah sulitnya mengundang narasumber sesuai kebutuhan, dari 4 narasumber pusat yang hadir cuma 1-2 orang karena padatnya jadwal narasumber yang bersangkutan.

22. *Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA*

Penyebabnya rendahnya serapan adalah :

1. Penyempurnaan Materi Teknis RTR KSP Metropolitan PASOPALAPA
 - Perubahan Deliniasi Kawasan Metropolitan PASOPALAPA (Painan, Solok, Padang, Lubuk Alung dan Pariaman) menjadi PALAPA (Padang, Lubuk Alung, Pariaman) hal ini disebabkan karena kawasan PASOPALAPA tidak terintegrasi karena terdapat hutan lindung diantara perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Solok dan Painan belum dikategorikan sebagai perkotaan
 - Perubahan Deliniasi kawasan yang tertuang dalam PP nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang direvisi menjadi PP Nomor 13 Tahun 2017 bahwa PALAPA dinyatakan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN)
 - Kawasan Metropolitan PALAPA juga ditetapkan menjadi kawasan strategis provinsi dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat
 - Akibat dari perubahan deliniasi yang diakibatkan oleh alasan tersebut

diatas, maka materi teknis RTR KSP Kawasan Metropolitan PASOPALAPA perlu direvisi kembali sesuai dengan deliniasi kawasan PALAPA.

2. Penyusunan naskah akademis dan ranperda RTR KSP kawasan metropolitan PASOPALAPA
 - Pembahasan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA dijadwalkan oleh Biro Hukum pada Tahun 2020 sehingga proses legalisasi belum bias terlaksana pada tahun ini
 - Akibat belum terlaksananya proses legalisasi, maka studi banding Ranperda RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA dan Koordinasi serta konsultasi dengan Kementerian dan stakeholder terkait belum dilaksanakan
3. Pemutakhiran Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Rencana RTR KSP Kawasan Metropolitan PASOPALAPA
 - Perubahan Deliniasi Kawasan Metropolitan PASOPALAPA menjadi PALAPA mengakibatkan perlunya revisi Peta Dasar , Peta Tematik dan Peta Rencana
4. Konsultasi Publik RTR KSP Kawasan Metropolitan PASOPALAPA
Konsultasi Publik dijadwalkan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi karena pembahasan di Biro Hukum dan DPRD ditunda pada tahun 2020, maka konsultasi publik ke 2 (dua) tidak jadi dilaksanakan.

23. *Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat*

Penyebabnya rendahnya serapan adalah :

1. Belanja akomodasi dan transportasi narasumber pusat tidak terserap maksimal karena ketersediaan/keterbatasan jumlah narasumber pusat dalam memenuhi permintaan kesediaan menjadi narasumber
2. Belanja vakasi yang dianggarkan untuk jumlah anggota TKPRD pada saat pembahasan dokumen rencana tata ruang tidak terserap maksimal dikarenakan jumlah anggota TKPRD yang hadir pada saat pembahasan tidak memenuhi kuota jumlah undangan anggota TKPRD

24. *Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan*

Penyebabnya rendahnya serapan adalah Perjalanan Dinas mendampingi studi banding belum dilaksanakan karena Ranperda RTR KSP Mandeh belum dibahas pada tahun ini, namun secara fisik pelaksanaan telah selesai 100%.

25. *Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar*

Penyebabnya rendahnya serapan adalah :

1. Sumber air baku yang ada terdapat kawasan hutan lindung dan sampai akhir tahun 2019 masih dalam proses pengurusan
2. Masih terdapat jalur pipa distribusi yang lahannya belum bebas

Solusinya adalah tetap berkoordinasi dengan masyarakat dan stakeholder setempat.

26. *Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota*

Penyebabnya rendahnya serapan adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan memonitoring kegiatan-kegiatan fisik dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

Solusinya adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

27. *Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat*

Penyebabnya adalah

1. Sisa dari bahan belanja habis pakai
2. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 17.056.000 tidak dapat direalisasikan

2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2018

Terkait rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa rekomendasi terkait penyelenggaraan urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun tindak lanjut dan tanggapan terhadap rekomendasi tersebut ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.14. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun 2018

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Rekomendasi terhadap pelaksanaan urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :</p>	
	<p>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan kegiatan, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan kualitas pekerjaan terjaga.</p>	<p>Untuk semua kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal dan kualitas pekerjaan terjaga perlu ditingkatkan SDM pengawasan dan perencanaan</p>
	<p>2. Kegiatan-kegiatan yang tidak tuntas dilaksanakan pada tahun 2018, untuk dianggarkan dan dituntaskan pelaksanaannya pada Tahun 2019 sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya.</p>	<p>Telah dianggarkan ditahun berikutnya untuk menuntaskan pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya</p>
	<p>3. Mempercepat proses penyiapan dokumen administrasi kegiatan, sehingga dapat ditenderkan pada awal tahun anggaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat terlambatnya tender tidak terjadi lagi.</p>	<p>Tersedianya SDM yang berkualitas dan kompeten di ULP, kalau perlu penambahan personil.</p>
	<p>4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu mempedomani target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dibidang pekerjaan umum yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dalam penyusunan program dan kegiatan serta dukungan anggaran, agar pelaksanaan program dan</p>	<p>Sudah mempedomani target pembangunan daerah yang ditetapkan RPJMD</p>

	kegiatan sejalan dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.	
	5. Untuk mendorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional di daerah serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya, maka perlu koordinasi yang lebih intens antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Pemerintah Pusat (kementerian terkait). Demikian juga dalam sinkronisasi kegiatan strategis nasional dan daerah dengan tujuan adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat terhadap kegiatan strategis daerah.	Akan ditingkatkan koordinasi yang lebih intens antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Pemerintah Pusat (kementerian terkait) dalam hal dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat seperti DAK
	6. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan kegiatan strategis agar terdapat sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	Sudah dilakukan penyesuaian dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017
	7. Pengalokasian anggaran untuk masing-masing OPD agar disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan anggaran dan target kinerja pembangunan daerah yang dibebankan kepada masing-masing OPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.	Dalam hal ini pengalokasian anggaran akan disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021
	8. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan yang strategis untuk menentukan program-program prioritas yang akan diakomodir dalam APBD.	Berdasarkan dari visi dan misi Gubernur maka OPD akan memprioritaskan program-program yang terakomodir dalam APBD Provinsi Sumatera Barat
	9. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang sering terjadi di	Bukan Tupoksi Dinas PUPR

	Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu mempercepat penyelesaian pekerjaan normalisasi sungai, pengamanan pantai serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka antisipasi bencana.	tetapi Dinas PSDA
	Rekomendasi Fraksi Partai Golkar	
	Agar OPD terkait Pekerjaan Umum selalu pro aktif dengan kementerian guna mendapatkan porsi dana dari tugas pembantuan.	Akan selalu ditingkatkan koordinasi dengan kementerian dalam hal untuk mendapatkan dana tugas pembantuan
	Rekomendasi Fraksi Partai Demokrat :	
	Untuk urusan Pekerjaan Umum meminta kepada OPD terkait agar lebih optimal terhadap pengawasan pekerjaan karena banyak hasil pekerjaan fisik yang kualitasnya rendah.	Dalam hal pengawasan nantinya akan lebih ditingkatkan SDM dari pengawasan dan jika perlu adanya kompetensi dalam hal pengawasan tersebut
	Rekomendasi Fraksi Partai Gerindra	
	Fraksi Gerindra ingin menekankan soal tidak matangnya perencanaan pembangunan dan lambatnya proses tender serta lemahnya pengawasan. Ini merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahun. Sehingga pelaksanaan pembangunan tidak maksimal dan bahkan ada yang tidak selesai.	Dalam hal ini kita meminta kepada ULP untuk menambahkan staf/pokja yang handal dan mempunyai kompetensi di bidang proses pengadaan barang dan jasa.
	Rekomendasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan :	
	Untuk urusan Pekerjaan Umum perlu adanya sinergi dengan BPBD dalam pembangunan shelter karena ada 5 daerah di Provinsi Sumbar yang dekat dengan pantai namun belum memiliki shelter.	Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berkoordinasi dengan BPBD untuk penetapan daerah rawan bencana untuk diusulkan pembangunan shelter
	Rekomendasi Fraksi Partai Hanura :	
	Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pencapaian kinerjanya masih belum optimal, baik dari realisasi anggaran maupun realisasi	Dari beberapa kegiatan ada realisasi anggaran yang belum optimal dikarenakan kegiatan-kegiatan fisik banyak yang baru

	<p>kegiatan, bahkan ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan startegis daerah tidak sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sebaiknya Dinas PUPR perlu mempedomani target pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.</p>	<p>dimulai pada Triwulan II dan III sehingga dengan waktu yang terbatas menyebabkan beberapa realisasi anggaran yang kurang terserap sesuai dengan rencana yang dibuat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membuat skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam RPJMD</p>
--	---	---

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Amanat tersebut telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat. Hal itu ditunjukkan dengan telah dilakukannya penyusunan penetapan kinerja Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat. Supaya rencana/target capaian kinerja yang ditetapkan di penetapan kinerja dapat terukur dengan susunan indikator kinerja yaitu indikator *output* maupun *outcome*. Indikator tersebut mengacu pada program dan sasaran/kegiatan yang merupakan komitmen Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat untuk dicapai dalam tahun 2019.

3.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan tugas pembantuan ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019.

3.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan ini diberikan oleh :

Rincian	Kode	Keterangan
Kementerian/lembaga	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Organisasi	04	Ditjen Bina Marga
Provinsi	08	Sumatera Barat
Kode>Nama Satker	089258	Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat

3.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

Amanat tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat. Komponen penetapan kinerja Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Program, dalam penyusunan penetapan kinerja, program dikaitkan dengan program penganggaran dalam DIPA dan mengacu kepada sasaran/kegiatan Renstra 2015-2019.
- Sasaran, sesuai dengan yang dimuat dalam Review Renstra Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum, pada perjanjian kinerja Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, sasaran programnya adalah meningkatnya konektivitas jalan nasional. Sasaran dan Kegiatan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi (tusi) dari Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2015 - 2019.
- Kegiatan, sebagaimana dicantumkan dalam DIPA Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat bahwa kegiatan merupakan basis satuan kinerja yang terkecil dari kegiatan pokok, sasaran maupun program dimana kinerja yang direncanakan harus disesuaikan dengan tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.4 Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

1	Program	Penyelenggaraan Jalan
	Sasaran Program	Meningkatnya konektivitas jalan nasional
	Output Program	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2	Kegiatan	Pemeliharaan Jalan Nasional
	Sasaran kegiatan	Pemeliharaan Jalan Nasional
	Output Kegiatan	a. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
		b. Preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan
		c. Preservasi Rutin Jembatan
		d. Preservasi Jembatan
		e. Layanan Dukungan Administrasi Satker

3.1 Indikator Kinerja Output pada tahun 2019

No	SKPD DINAS PRASARANA JALAN	SATUAN	TARGET 2019
-----------	-----------------------------------	---------------	--------------------

	PROVINSI SUMATERA BARAT		AWAL	REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	49.11	-
2	Pemeliharaan Rutin Kondisi	Km	8.03	-
3	Penunjang (Holding)	Km	3.77	-
4	Rehabilitasi Minor Jalan	Km	0.70	-
5	Longsor	Km	0.05	-
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	meter	281.1	-
7	Pemeliharaan Berkala Jembatan	meter	50	-
8	Pemantauan Pelaporan Secara Elektronik	layanan	12	-
9	Administrasi Kegiatan	layanan	12	-
10	Penyusunan Laporan Keuangan BMN	layanan	12	-

Pelaksanaan program/kegiatan

1. Pencapaian kinerja Fisik Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 ini cukup baik hal ini bisa dilihat pada capaian dengan dana DIPA Rp. 8.123.284.000,- realisasi fisik 100 % dengan rincian :

- Pemeliharaan Rutin Jalan ditargetkan 49,11 Km, terealisasi fisik sebesar 100 %.
- Pemeliharaan Rutin Kondisi ditargetkan 8,03 Km, terealisasi fisik sebesar 100 %.
- Kinerja penunjang (holding) ditargetkan 3,77 Km, terealisasi fisik sebesar 100%.
- Rehabilitasi Minor Jalan ditargetkan 0,70 Km, terealisasi fisik sebesar 100%.
- Longsor ditargetkan 0,05 Km, terealisasi fisik sebesar 99,64%.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan ditargetkan 281,1 meter, terealisasi fisik 100%.
- Pemeliharaan Berkala Jembatan ditargetkan 50 meter, terealisasi fisik 100%.

2. Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 ini adalah sebesar sebesar Rp. 7.801.539.370- (96,039 %).



**LAPORAN KINERJA BALAI TRIWULANAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

kinerja >=0% dan <30%

kinerja >=30% dan <50%

kinerja >=50% dan <60%

kinerja >=60% dan <70%

kinerja >=70% dan <80%

kinerja >=80% dan <90%

kinerja >=90% dan <100%

No	Kode	Program/ Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Keuangan		Fisik			Capaian Target
						RN	RL	RN	RL	Kinerja	
1	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	8.123.284,00	7.801.539,37	0,00	96,04	100,00	99,17	99,17	
2	2409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	60,91	2.165.830,00	2.095.263,00	0,00	96,74	100,00	100,00	100,00	
3	2409.001	Pemeliharaan Rutin	49,11	1.289.460,00	1.218.894,00	100,00	94,53	100,00	100,00	100,00	
4	2409.001	Pemeliharaan Rutin Kondisi	8,03	433.110,00	433.110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	2409.001	Penunjangan/ Holding	3,77	443.260,00	443.259,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	2409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	0,75	4.276.800,00	4.101.809,10	0,00	95,91	100,00	99,75	99,75	
7	2409.002	Rehabilitasi Minor Jalan	0,7	1.276.800,00	1.227.399,00	100,00	96,13	100,00	100,00	100,00	
8	2409.002	Penanganan Longsor	0,05	3.000.000,00	2.874.410,10	100,00	95,81	100,00	99,64	99,64	
9	2409.004	Preservasi Rutin Jembatan	281,1	281.100,00	243.760,00	0,00	86,72	100,00	100,00	100,00	
10	2409.004	Pemeliharaan Rutin Jembatan	281,1	281.100,00	243.760,00	100,00	86,72	100,00	100,00	100,00	
11	2409.005	Preservasi Jembatan	50	134.800,00	128.418,00	0,00	95,27	100,00	100,00	100,00	
12	2409.005	Pemeliharaan Berkala Jembatan	50	134.800,00	128.418,00	100,00	95,27	100,00	100,00	100,00	
13	2409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	36	1.264.754,00	1.232.289,27	0,00	97,43	100,00	95,52	95,52	
14	2409.015	Penyusunan Laporan Keuangan BMN	12	61.932,00	61.573,28	100,00	99,42	100,00	98,87	98,87	
15	2409.015	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)	12	22.750,00	22.745,30	100,00	99,98	100,00	99,98	99,98	
16	2409.015	Administrasi Kegiatan	12	1.180.072,00	1.147.970,69	100,00	97,28	100,00	95,26	95,26	

Dari capaian diatas

3.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana tugas pembantuan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah dana APBN tahun 2019 dengan nomor DIPA (Revisi ke 03) : SP DIPA-033.04.4.089258/2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.123.284.000,- (*Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

3.6 Permasalahan dan Solusi

Pada tugas pembantuan ini tidak ada masalah atau kendala yang berarti sehingga pelaksanaan dapat mencapai target yang diinginkan.

BAB IV PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LKPJ disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. LKPJ ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 16 (enam belas) program, meliputi: 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Pada tahun anggaran 2019 terdapat (dua) sasaran strategis Dinas yang seluruhnya dapat diukur berdasarkan target indikator kinerjanya masing-masing. Pada umumnya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja sebelumnya dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing program.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019 ini adalah sebesar 82,45% (Rp. 395,100,652,064.6,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 479,186,523,089.00,-. Kualitas pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program tahun 2019 yaitu bahwa terdapat 12 (dua belas) program berkinerja sangat baik dan 4 (empat) program berkinerja baik.

2. Dari 16 (enam belas) program yang ada pada tahun 2019, capaian kinerja fisik pekerjaan terlaksana dengan kinerja sangat baik dengan persentase capaian rata-rata 98,21 %.
3. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada.
4. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2019 dapat dijadikan cerminan untuk antisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2020

Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640515 199003 1 010

DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK TAHUN 2019

Pembangunan Gedung Kebudayaan



REHAB/PEMEL JALAN & JEMBATAN DI WILAYAH I



REHAB/PEMEL JALAN & JEMBATAN WILAYAH II



REHAB/PEMEL JALAN & JEMBATAN WILAYAH III



REHAB/PEMEL JALAN & JEMBATAN WILAYAH IV



REHAB/PEMEL JALAN & JEMBATAN WILAYAH V



REHAB/PEMEL JALAN & JEMBATAN WILAYAH VI



PENGADAAN ALAT BERAT

